

**ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA SEMARANG)**

**ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF SEMARANG CITY FIRE FIGHTING
SERVICE PERFORMANCE REPORTS
(CASE STUDY ON THE FIRE FIGHTING SERVICE IN THE CITY OF SEMARANG)**

Ronaldus Narung¹, G. Anggana Lisiantara²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang

ronaldusnarung44@gmail.com¹

Anggolis@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the performance achievements of the Semarang City Fire Department and its suitability to the goals, targets and programs that have been set. The data collection technique used is data observation technique. This research uses a descriptive qualitative method, namely collecting, classifying, interpreting and analyzing data to provide clear and accurate answers from the formulation of the problem and then comparing theories related to the problem being discussed to then make conclusions and suggestions that are considered important. The results of the research and discussion carried out by the author show that overall the performance of the Semarang City Fire Department's activities has generally demonstrated excellent performance with an achievement score of 100%. Thus, it can be said that for 2024 we have been successful in achieving the targets that have been set targets

Keywords: Accountability Analysis, Government Agency Performance Reports, Fire Department

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan kesesuaiannya dengan tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan menganalisa data untuk memberikan jawaban yang jelas dan akurat dari perumusan masalah dan kemudian melakukan perbandingan terhadap teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas untuk kemudian membuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis bahwa secara keseluruhan kinerja kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2024 dikatakan sudah berhasil dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Analisis Akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemadam Kebakaran

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mahsun, 2013).

Mardiasmo (2007) akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ledvina V. Carino dalam Pusdiklatwas BPKP (2007) tentang akuntabilitas instansi pemerintah mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada di luar tanggung jawab dan kewenangannya. Selanjutnya J.B. Gharthey yang juga dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Sedangkan menurut SK-LAN Nomor: 239/1X/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan menuju

tatanan pemerintah yang baik (Suryanto, 2017; Ningrum & As'ari, 2021; (Syaflan & Sulistiarini, 2022). Akuntabilitas kinerja merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi.

Kinerja merupakan gambaran sebuah tingkatan pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan tertentu dengan tujuan, sasaran, visi dan misi yang ada dalam strategi perencanaan organisasi tersebut. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai sukses atau tidaknya program atau kegiatan yang dilakukan organisasi sektor publik (Setiawan & Avrilianni, 2020; Nurafifah et al., 2022; Suridiyanti et al., 2024). Salah satu hal yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya.

Banyak permasalahan yang berkaitan dengan kinerja, terutama permasalahan mengenai kinerja pegawai. Banyak pegawai yang tidak tahu tentang konsep dari kinerja itu sendiri, mereka hanya melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saja, tanpa mempedulikan bagaimana output dan outcome atas kinerja yang telah dilaksanakan. Para pegawai hanya sebatas memahami bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah di mana mereka telah melaksanakan pekerjaannya dengan benar yang telah sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Padahal konsep kinerja yang sebenarnya bukan hanya sebatas telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang, akan tetapi banyak komponen lain yang digunakan sebagai penilaian kinerja (Tambajong et al., 2023).

Salah satu organisasi yang memiliki akuntabilitas laporan kinerja adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang,

Pemadam Kebakaran Kota Semarang tergolong ke dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang. Berdasarkan dalam bunyi Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menjelaskan bahwa tugas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Analisis akuntabilitas laporan kinerja sangat penting untuk diteliti karena melibatkan evaluasi terhadap transparansi, integritas, dan efektivitas organisasi atau entitas yang menghasilkan laporan kinerja tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hermina Worotikan et al., (2018) menemukan bahwa format penyusunan LAKIP DPU Minahasa Tahun 2016 sebagian besar telah disusun sesuai dengan PERMENPAN nomor 29 tahun 2010 namun masih terdapat unsur-unsur dalam format penyusunan LAKIP DPU yang tidak sesuai dengan peraturan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Assa et al., 2019) menemukan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Manado dapat meningkatkan transparansi yang lebih baik dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang sejalan dengan implementasi sistem pertanggungjawaban keuangan. Dalam hal ini setiap instansi baik pimpinan maupun perangkat kerja wajib mencatat dan melaporkan penggunaan keuangan negara dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yaitu Sumber Daya Manusia yang Kurangnya pemahaman dan koordinasi antara

penyelenggara dan wali/pengguna anggaran di instansi tersebut sehingga terdapat perbedaan dokumen laporan yang diperoleh.

Lebih lanjut lagi, Anggraini (2021) menemukan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019 Sangat berhasil. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017-2019 telah sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi No 53 Tahun 2014 yaitu, perjanjian kinerjanya sudah disusun oleh pimpinan skpd, pelaporan kinerjanya sudah disampaikan apabila tahun berjalan sudah habis masanya, reviu laporan kinerja sudah direview oleh auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Merujuk pada latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan analisis akuntabilitas laporan kinerja, dengan judul penelitian "*Analisis Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang*".

Perumusan masalah merupakan hal yang penting karena menjadi penuntun bagi langkah selanjutnya, terutama dalam mengkonstruksi suatu analisis. Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, masalah yang diungkapkan oleh penulis adalah Apakah kinerja Pemadam Kebakaran Kota Semarang semakin baik sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang telah ditentukan, penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pemadam Kebakaran SKPD Kota Semarang.

Tujuan merupakan hal yang sangat penting didalam suatu penelitian, Karena tujuan penelitian dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang ingin dicapai. Tujuan dilakukannya analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran SKPD Kota Semarang sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas

Menurut Widyatama et al., (2017) akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur pemerintah atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Dengan adanya suatu akuntabilitas diyakini dapat mengubah kondisi pemerintahan yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik, mencegah adanya korupsi, dan meminimalisir adanya penyelewengan kekuasaan.

Akuntabilitas telah menjadi prinsip universal dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, akuntabilitas secara eksplisit diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memperptanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target

kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2011: 2). Seluruh instansi Pemerintah wajib memahami.

2. Kinerja

Menurut SK-LAN Nomor: 239/1X/6/8/2003 menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sedangkan “kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Yang dimaksud instansi pemerintah adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Penyusunan lakip berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan.

LAKIP adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh

instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti dan Rika, 2015). Sedangkan Menurut Rahmadan (2014) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Teknik Pengambilan Data

1. Data kualitatif adalah data atau informasi yang diperoleh dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang relevan dengan judul skripsi yang diambil oleh penulis, misalnya data berupa struktur organisasi, rencana strategis, rencana kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) beserta keterangan tambahan berupa penjelasan tentang laporan tersebut.
2. Data kuantitatif adalah data berupa hasil pengukuran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tahun 2022.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui investigasi lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data primer (Sugiono, 2015). Dataprime menunjukkan keaslian informasi yang terkandung di dalam data tersebut (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

2. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

3. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Seluruh Karyawan Dinas Pemadam Kebakaran di 7 tempat Kota Semarang. Sehingga secara keseluruhan populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.

4. Teknik Pengambilan Data

1. Observasi lapangan, metode observasi juga dilakukan dalam penelitian ini, metode ini digunakan dengan maksud mengetahui respon subyek yang diteliti mengenai permasalahan yang ada. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti (direct observation). Observasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku subyek pada saat observasi berlangsung. Data yang diperoleh dari observasi langsung akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden.
2. Dokumen, teknik pengumpulan data dengan dokumen juga digunakan dalam penelitian ini, pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung dan bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
3. Wawancara, pengumpulan data yang di peroleh dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah metode deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan menganalisa data untuk memberikan gambaran dan jawaban yang

jelas dan akurat dari perumusan masalah dan kemudian melakukan perbandingan terhadap teoriteori yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas untuk kemudian membuat kesimpulan dan sara-saran yang dianggap penting. Perhitungan presentase pencapaian target dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakinbaik, maka digunakan rumus untuk perhitungan anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan Program, kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 1.
Interval Kelas

Skor	Kriteria
100%	Sangat Baik
>85% - <99%	Baik Sekali
>70% - <85%	Baik
>55% - <70%	Cukup Baik
<55%	Kurang Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Responden

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa responden dari penelitian ini adalah staff dan karyawan Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Semarang.

Tabel 2

Karakteristik Responden Berdasarkan usia.

NO	USIA	JUMLAH RESPONDEN	PERESENTASE %
1	20-30 tahun	15	15%
2	30-40 tahun	35	35%
3	41-50 tahun	33	33%
4	Diatas 50 tahun	17	17%
	Jumlah	100	100%

Sumber data sudah diolah.

Pada table 2 menunjukkan tingkat usia responden dari 100 responden yaitu 15

orang (15%), yang berusia antara 30-40 tahun terdapat 35 orang (35%), yang berusia 41-50 tahun terdapat 33 orang (33%), yang berusia diatas 50 tahun terdapat 17 orang (17%). Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa staff dan karyawan Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Semarang yang berusia 30-40 tahun terdapat 35 orang dengan persentase 35%.

Tabel 3
Karateristik Responden Berdasarkan Lama Kerja

NO	LAMA KERJA	JUMLAH RESPONDEN	PERESENTASE %
1	1-5 tahun	68	68%
2	1-10 tahun	15	15%
3	≥ 10 tahun	17	17%
4	Jumlah	100	100%

Sumber data sudah diolah.

Pada table 3 menunjukkan tingkat masa kerja atau lama bekerja responden. Dari 100 responden yaitu sejumlah 68 orang (68%) yang memiliki masa kerja 1-5 tahun, yang terdapat 15 orang (15%), yang berada pada masa kerja > 10 tahun sejumlah 17 orang (17%) . Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lama kerja dari Dinas Pemadam Kebakara (DAMKAR) Kota Semarang yaitu 1-5 tahun jumlah 68 orang dengan persentase 68%

Tabel 4.

Karateristik Responden Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDE N	PERESENTASE %
1	SMA	6	6%
2	D3	11	11%
3	S1	82	82%
4	S2	1	1%
	JUMLAH	100	100%

Sumber data sudah diolah

Pada table 4 dapat diketahui dari 100 responden bahwa yang berpendidikan SMA berjumlah 6 orang (6%), yang berpendidikan D3 berjumlah 11 orang (11%), yang berpendidikan S1 berjumlah 82 orang (82%), yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang (1%). Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa responden Dinas Pemadam

Kebakara (DAMKAR) Kota Semarang sebagian besar tingkat berpendidikan adalah S1 berjumlah 82 orang (82%).

2. Analisis Deskriptif

Analiss desriptif bertujuan untuk mendeskripsikan variable-variabel penelitian melalui google form distribusi frekuensi jawaban responden secara keseluruhan, baik dalam jumlah responden orang maupun dalam angka persentase terhadap item-item penelitian (Sani dan vivin, 2013:235).

3. Uji Reliabilitas

Tujuan utama dilakukan uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Sekaran, 2010). Hasil uji reliabilitas mencerminkan apakah suatu instrumen penelitian dapat dipercaya tergantung pada seberapa stabil dan akurat instrumen tersebut dalam arti pengukuran yang dihasilkan merupakan pengukuran yang akurat dari instrumen tersebut.

Tabel 5. Tabel Uji Reliabilitas

Variabel	Crobach Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja (x1)	0,884127761	Reliabel
Pengendalian Akuntansi (x2)	0,853189407	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (x3)	0,768157895	Reliabel
Komitmen Organisasi (x4)	0,881333968	Reliabel
Sistem Pelaporan	0,77795363	Reliabel

Data sudah diolah

4. Uji Validitas

Data kuesioner dapat dinilai valid jika pertanyaan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner yang terkait. Validitas dari pertanyaan dalam kuesioner dapat diukur dengan melakukan korelasi antar skorbutir pertanyaan dengan total skor kontruk atau variable. Nilai Correlated itemTotal correlation dibandingkan dengan hasil perhitungan r table. pertanyaan atau indikator dinyatakan valid jika r hitung > r table (Ghozali, 2011).

5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan menentukan apakah model regresi dapat menemukan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen (Ghozali & Laten, 2012). Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan cara Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance <0.10 atau sama dengan nilai VIF 0>10.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

No	Variabel bebas	Statistik Kolineritas		Multikolinearitas
		Toleransi	VIF	
1	Akuntabilitas Kinerja (x1)	0,562337	1,778294	Tidak terjadi
2	Pengendalian Akuntansi (x2)	0,782546	1,27788	Tidak terjadi
3	Kejelasan Sasaran Anggaran (x3)	0,708832	1,410772	Tidak terjadi
4	Komitmen Organisasi (x4)	0,680993	1,468444	Tidak terjadi

Data sudah diolah

Berdasarkan data hasil pengujian asumsi multikolinieritas. Nilai variable inflation factor (VIF) semua variable bebas <10, artinya variable bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

6. Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk memastikan apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual berdistribusi normal. Analisis grafis dan pengujian statistik merupakan duacara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal. Distribusi normal akan membentuk diagonal lurus dan histogram dari data yang tersisa akan dibandingkan dengan diagonal. (Ghozali & Laten, 2012). Uji normalitas dengan grafik harus dilakukan dengan hati-hati karena secara visual akan terlihat normal, tetapi secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu disarankan selain untuk uji grafis, juga dilengkapi untuk uji statistik. Uji statistik sederhana yang dapat digunakan untuk memeriksa normalitas residual adalah uji statistik non parametrik.

Tabel 7. Uji Normalitas
Uji Kolmogrow Smirnow

Ustandar Residual		
N		100
Normal Parameters	Mean	0,000
	Standar Deviasi	3,2057
Kolmogorov-Smirnow Z		0,00992
Asymp. Sig. (Tailed)		0,0895

Data sudah diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0895 > 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi.

7. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya mengenai pengaruh variable independen. Perhitungan statistic analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan program spss, pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau ingkat signifikan 0,05%. Untuk menguji tingkat kebenaran hipotesis tersebut digunakan analisis regresi linier, pada analisis linier ini akan dilakukan uji F serta uji t. Adapun

hasil perhitungan tersebut dapat diketahui padatabel dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Conctant)	3,959	2,016
Akuntabilitas Kinerja	0,205	0,052
Pengendalian Akuntansi	0,325	0,061
Kejelasan Sasaran	0,048	0,073
Anggaran	0,016	0,072
Komitmen Organisasi		

Data Sudah Diolah

8. Koefisien Determinasi

Koefien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable-variabel bebas terhadap variable terikatnya dari koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjuster R Square sebagai berikut ini:

Tabel 9. Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	0,777	0,604	0,587	1,348

Data sudah diolah

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R^2 yang diperoleh 0,587, hal ini berarti 58,7% kinerja karyawan dipengaruhi oleh akuntabilitas kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi, dalam hal ini variable lainnya ada kemungkinan dipengaruhi kurangnya keahlian dari kinerja Dinas Pemadam Kebakaran.

9. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas

Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tabel berikut.

10. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021, dapat dirinci pagu dan realisasi anggaran per program sebagai berikut: Dari Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar: **Rp. 27.020.225.728**, penyerapan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 25.948.342.774**, dengan sisa sebesar Rp 1.071.882.954,- (3,97%) dengan uraian berikut:

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp 25.510.411.668,- dengan realisasi Rp 24.671.602.071,- (96,71%) dan sisa anggaran sebesar Rp 838.809.597,- (3,29%).
2. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp 1.509.814.060,- dengan realisasi sebesar Rp 1.276.740.703,- (84,56%) dan sisa anggaran sebesar Rp 233.073.357,- (15,44%).

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan kinerja yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Semarang yang berupa anggaran realisasi, pendapatan dan belanja secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, dan dari sisi input maupun output, terhadap rencana maupun target yang ditentukan.

2. Dari target yang ditentukan terhadap perencanaan dan monitoring evaluasi, bahwa capaian sasaran.
3. Perencanaan dan monitoring evaluasi sebesar 100% terlaksana dengan baik, dimana kegiatan pengelolaan keuangan menunjukkan capaian kinerja yang optimal.

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian, melihat pelaksanaan tugas yang ada penulis dengan akal yang sehat dan berfikir memberikan saran yang mana setidaknya bisa diterima oleh masyarakat dan instansi.

Bagi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

1. Untuk meningkatkan kriteria akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, diharapkan untuk melanjutkan setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah ditentukan.
2. Untuk meningkatkan kriteria kualitas layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, diharapkan untuk meningkatkan penerapan komitmen kepada petugas dalam menanggulangi bencana kebakaran, serta dapat meningkatkan sarana dan Prasarana pendukung jalannya kegiatan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang perlu menambahkan pos-pos pembantu pemadam kebakaran di setiap Kecamatan di Kota Semarang untuk mempermudah proses pemadaman kebakaran.

Bagi Peneliti Lain.

Melakukan pengembangan penelitian agar dapat mengetahui secara lebih menyeluruh mengenai terkait Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran serta rekomendasi pengendalian yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Tri Pratiwi^{1*}, Dewi Mahmuda¹, Ernawati Malik¹ (2022). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Baubau). <https://www.jurnalumbuton.ac.id/index.php/Pencerah> <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1859>
- Indri Intan Yunike Tambajong, Jessy D. Warongan, Djeni Maradesa (2024). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- M. Ali Zakiyudin¹, Suyanto². Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal 89 - 96 ISSN 2339 - 1545
- Marco Hendri Tambajong, Ventje Ilat², Heince R. N. Wokas³. (2023) Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa
- Susan Santoso. (2018). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Propinsi Sulawesi Utara. ISSN 2303-1174
- Rulyanti Susi Wardhani. Analisis Pemahaman dan Akuntabilitas Manajer Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang. *Pekbis Jurnal*, Vol.5, No.2, Juli 2013: 83-92.
- RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023